

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>SEKRETARIAT DPRD</p>	Nomor SOP	896.1/ 4699
	Tanggal Pembuatan	30 November 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	30 November 2022
	Disahkan Oleh	<p>Sekretaris DPRD</p>  <p>Drs. MUNADL, M.Si. Perdana Utama Muda NIP 19690907 199101 1 001</p>
Judul SOP	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen; 4. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 6. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD; 7. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Setwan PNS, THL, semua jenjang

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar 2. SOP Rapat Paripurna 3. SOP Penyelenggaraan Rapat Alat Kelengkapan DPRD 4. SOP Perjalanan Dinas 5. SOP Verifikasi SPJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. SDM
<p style="text-align: center;">PERINGATAN</p>	<p style="text-align: center;">PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tidak sesuai tahapan, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<p>Fullboard Bapemperda</p>

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Bag. Hukum	Bapem-perda	Ketua DPRD	Menkum ham	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rapat Internal Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen membahas rencana Raperda Inisiatif DPRD.		 ↓			<ul style="list-style-type: none"> • Undangan, • Daftar hadir, • Notulen, • Dokumentasi 	120 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan program pembentukan Perda berdasarkan skala prioritas disertai alasan di lingkungan DPRD 	Bamus
2	Rapat Kerja Bapemperda bersama Bagian Hukum dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.		 ↓			<ul style="list-style-type: none"> • Undangan, • Daftar hadir, • Notulen, • Dokumentasi 	120 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan program pembentukan Perda yang terdiri dari Raperda Inisiatif DPRD dan Raperda Eksekutif 	Bamus
3	Fullboard Bapemperda membahas Repropemperda		 ↓			<ul style="list-style-type: none"> • Undangan, • Daftar hadir, • Notulen, • Dokumentasi 	2 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan program pembentukan Perda yang terdiri dari Raperda Inisiatif DPRD dan Raperda Eksekutif 	Bamus
4	Bapemperda mengajukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang		 →	 ↓		<ul style="list-style-type: none"> • DIM, • Naskah Akademik, 	14 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Draft Naskah Akademik • Draft Raperda Inisiatif DPRD 	Undangan

	diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD kepada Kanwil Menkumham					• Raperda			
5	Bagian Hukum mengajukan pengharmonisasian kepada Kanwil Menkumham					• DIM, • Naskah Akademik, • Raperda	14 hari	• Draft Naskah Akademik Eksekutif • Draft Raperda Eksekutif	Undangan
6	Fullboard Bapemperda membahas Propemperda					• Undangan, • Daftar hadir, • Notulen, • Dokumentasi	2 hari	• Rancangan program pembentukan Perda yang terdiri dari Raperda Inisiatif DPRD dan Raperda Eksekutif yang telah diharmonisasi	Bamus
7	Rapat Paripurna Penetapan Propemperda					• SK Pimpinan • BA Persetujuan	1 hari	• Keputusan Pimpinan DPRD terhadap Penetapan Propemperda • Berita Acara kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD terhadap Penetapan Propemperda	Bamus
Total waktu							3 bulan		